



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PESERTA PENERIMA BIAYA PENELITIAN BERBASIS KELUARAN
TENTANG ISU-ISU AKTUAL PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIMBINGAN MASYARAKAT AGAMA DAN LAYANAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil review/penilaian proposal penelitian berbasis keluaran tentang isu-isu aktual oleh tim penjaminan mutu pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, maka perlu menetapkan peneliti yang layak mendapatkan biaya penelitian berbasis keluaran tentang isu-isu aktual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Penetapan Peserta Penerima Biaya Penelitian Berbasis Keluaran tentang Isu-Isu Aktual Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Agama dan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1074);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian Berbasis Keluaran Pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PESERTA PENELITIAN BERBASIS KELUARAN TENTANG ISU-ISU AKTUAL PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN.
- KESATU : Menetapkan peserta penerima biaya penelitian berbasis keluaran tentang isu-isu aktual pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan adalah mereka yang namanya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penelitian mulai perencanaan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan selama tiga bulan kalender setelah diterimanya biaya penelitian.
 2. Menyampaikan laporan kepada Penyelenggara Penelitian berupa: a) Laporan hasil penelitian lengkap; b) *Executive summary*; dan c) *Policy brief* dalam bentuk *hardcopy* (tiga rangkap) dan *softcopy* (dalam CD).
 3. Mendiseminasikan hasil penelitian yang dilakukannya pada acara seminar yang diselenggarakan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan atau media diseminasi lain yang dimiliki oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

- KETIGA : Hasil penelitian yang telah diterima penyelenggara penelitian merupakan hak milik penyelenggara penelitian.
- KEEMPAT : Pembayaran biaya penelitian dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap pertama sebesar 70% dan tahap kedua sebesar 30%;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



MAD GUNARYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PESERTA PENELITIAN BERBASIS KELUARAN TENTANG ISU-
ISU AKTUAL PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN

DAFTAR NAMA PESERTA PENELITIAN ISU-ISU AKTUAL

NO.	NAMA	JUDUL PENELITIAN	BIAYA
1.	Dr. Muhammad Ulinuha, Lc., M.A.	Strategi Implementasi Konsep Moderasi Beragama Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)	Rp. 35.910.000,-
2.	- Didin Nurul Rosidin, Ph.D; - Dr. Budi Manfaat, M.Si; - Hastuti Sari Budiningsih, S.E.	Evaluasi Pembelajaran Literasi Informasi di Madrasah Aliyah	Rp. 111.500.000,-

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



MAD GUNARYO

EVALUASI PEMBELAJARAN LITERASI INFORMASI DI MADRASAH ALIYAH



Tim Peneliti:

Didin Nurul Rosidin, Ph.D

Dr. Budi Manfaat, M.Si

Hastuti Sari Budiningsih, S.E



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA RI

EVALUASI PEMBELAJARAN LITERASI INFORMASI DI MADRASAH ALIYAH

Peneliti:

Didin Nurul Rosidin, Ph.D
Dr. Budi Manfaat, M.Si
Hastuti Sari Budiningsih, S.E



BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN & PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA

ABSTRAK

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menganalisis, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif, mengharuskan untuk meninjau kembali dunia pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran literasi informasi di madrasah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian evaluatif. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Penelitian dilakukan di 14 Madrasah Aliyah yang ada di Jawa Barat. Hasil identifikasi menemukan bahwa sebagian besar guru memiliki konsepsi literasi informasi sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang secara terbatas dipahami sebagai keterampilan komputer pengolah kata dan keterampilan mencari informasi Internet. Hanya sedikit guru yang memiliki konsepsi literasi informasi sebagai penerapan informasi untuk menghasilkan pengetahuan baru berkisar pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang materi pelajaran melalui penggunaan informasi. Demikian juga konsepsi literasi informasi sebagai pengalaman penelitian, seperti mengumpulkan pengalaman data primer, mengembangkan keterampilan menulis penelitian, dan menawarkan siswa untuk belajar melalui pengalaman. Studi ini juga menemukan adanya kesenjangan antara konsepsi dan praktik penerapannya. Banyak guru melihat perangkat teknologi informasi sebagai alat yang efektif untuk mengelola pembelajaran literasi informasi, tetapi tidak selalu berarti menggunakannya. Beberapa penyebabnya adalah terkait dengan dukungan perangkat, akses, pengetahuan, keterampilan, dan komitmen.

Kata kunci: evaluasi pembelajaran, literasi informasi, madrasah

KATA PENGANTAR

Alhamdu Lillahi Robbil Alamiin, naskah akademik hasil penelitian yang berjudul “Evaluasi Pembelajaran Literasi Informasi di Madrasah Aliyah” ini berhasil diselesaikan. Ide penelitian ini muncul kenyataan tentang masih rendahnya rata-rata kemampuan dan keterampilan literasi informasi masyarakat. Kenyataan tersebut mengharuskan untuk meninjau kembali dunia pendidikan. Secara umum, pendidikan yang dimaksud adalah mencakup pendidikan keluarga, pendidikan sekolah atau madrasah, pendidikan pesantren, dan juga model pendidikan lainnya. Secara khusus, madrasah sebagai lembaga pendidikan formal bermuatan nilai-nilai keislaman, sangat penting dijadikan sebagai fokus perhatian. Hasil evaluasi ini diharapkan bisa menjadi landasan empirik untuk perumusan kebijakan dan perencanaan tindak lanjut perbaikan pembelajaran di madrasah, khususnya dalam menghadapi kehidupan di era informasi dan teknologi.

Ucapan terimakasih kepada BALITBANGDIKLAT Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah memberi kesempatan dan mendanai penelitian ini. Ucapan terimakasih juga kepada pimpinan madrasah, narasumber, informan, dan responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Tak terkecuali, kepada tim yang membantu penggalan data.

Akhir kata, semoga hasil penelitian ini bisa menjadi landasan empirik untuk perumusan kebijakan dan perencanaan tindak lanjut perbaikan pembelajaran di madrasah. *Aamiin*.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Pernyataan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Relevansi dan Pentingnya Penelitian.....	7

BAB II: TINJAUAN LITERATUR

2.1 Tinjauan Konseptual.....	8
2.2 Tinjauan Teori.....	15
2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	16

BAB III: METODE PENELITIAN

3.1 Disain Penelitian.....	17
3.2 Lokasi/Tempat dan Waktu Evaluasi.....	17
3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumentasi.....	17
3.4 Keabsahan Data.....	18
3.5 Analisis Data.....	19

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	20
4.2 Pembahasan.....	33

BAB V: SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan dan Saran.....	39
-------------------------	----

REFERESNSI.....	40
-----------------	----

LAMPIRAN.....	43
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan abad 21 bagi madrasah di Indonesia adalah membekali siswa yang terlahir sebagai *digital natives* dengan keterampilan abad 21 (Kurniawan, 2019). Tantangan itu terpenuhi jika guru madrasah memiliki kemampuan mengakses, mengevaluasi, mengorganisasi, dan menggunakan informasi dalam proses belajar, pemecahan masalah, membuat keputusan formal dan informal dalam konteks belajar, pekerjaan, rumah, ataupun dalam pendidikan. Kemampuan-kemampuan yang demikian disebut sebagai kemampuan literasi informasi.

Literasi informasi semakin penting seiring dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan sumber daya informasi berkembang pesat. Pada era informasi, individu dihadapkan pada beragam pilihan informasi yang berlimpah. Informasi yang datang kepada individu dalam format tanpa filter, menimbulkan pertanyaan tentang keaslian, validitas, dan keandalannya. Selain itu, informasi yang tersedia melalui berbagai media itu menimbulkan tantangan baru bagi individu dalam mengevaluasi dan memahaminya. Kualitas yang tidak pasti dan kuantitas informasi yang berkembang menjadi tantangan besar bagi masyarakat. Kelimpahan informasi tidak akan dengan sendirinya menciptakan masyarakat yang cerdas, tanpa kemampuan pelengkap yang diperlukan untuk menggunakan informasi secara efektif.

Generasi *digital natives* (Prezky, 2001) sangat mudah mendapatkan akses informasi menggunakan perangkat teknologi internet. Namun demikian, mereka bukan hanya memerlukan informasi. Mereka juga membutuhkan bimbingan dalam hal mengevaluasi, mengorganisasi, dan menggunakan informasi dalam proses pemecahan masalah. Mereka juga perlu mengembangkan sikap dan kepribadian yang baik melalui melalui keteladanan-keteladanan nyata.

Tanpa etika, kemampuan mengevaluasi konten informasi, dan menganalisis latar belakang informasi yang tersedia di internet, maka dapat berakibat munculnya pemahaman dan perilaku menyimpang. Temuan survei Katadata Insight Center (KIC) yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta SiBerkreasi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa setidaknya 30% sampai hampir 60% orang Indonesia terpapar hoaks saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara hanya 21% sampai 36% saja yang mampu mengenali hoaks. Sebagian besar hoaks yang ditemukan terkait isu politik, kesehatan dan agama.

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menganalisis, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif, mengharuskan untuk meninjau kembali dunia pendidikan. Secara umum, pendidikan yang dimaksud adalah mencakup pendidikan keluarga, pendidikan sekolah atau madrasah, pendidikan pesantren, dan juga model pendidikan lainnya. Secara khusus, madrasah sebagai lembaga pendidikan formal bermuatan nilai-nilai keislaman, sangat penting dijadikan sebagai fokus perhatian.

1.2 Pernyataan Masalah

Ketersediaan akses informasi semakin meningkat tetapi kemampuan literasi informasi masyarakat masih rendah. Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal diharapkan berhasil mengatasi masalah tersebut, melalui pembelajaran literasi informasi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana madrasah menghadapi era informasi?
2. Bagaimana kesiapan guru madrasah dalam pembelajaran literasi informasi?
3. Bagaimana proses pembelajaran literasi informasi di madrasah? (Apakah pembelajaran oleh guru di madrasah sudah dirancang sedemikian rupa sehingga mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan literasi informasi?)

1.4 Relevansi dan Pentingnya Penelitian

Evaluasi ini perlu dilakukan untuk perbaikan mutu pembelajaran di madrasah, khususnya dalam menghadapi tantangan era informasi. Hasil evaluasi akan menjadi landasan empirik untuk perumusan kebijakan dan perencanaan tindak lanjut perbaikan pembelajaran di madrasah.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Tinjauan Konseptual

2.1.1 Literasi Informasi

Konsep literasi telah mengalami perluasan makna, dari pengertian semula yang hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis (*melek* baca-tulis) kemudian meluas mencakup bidang penting seperti literasi numerasi, literasi teknologi, literasi keuangan, dan sebagainya, termasuk literasi informasi. *American Library Association* (1989) mendefinisikan Literasi informasi sebagai seperangkat kemampuan yang mengharuskan individu untuk mengenali kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Literasi informasi diakui secara global sebagai kompetensi penting yang dikaitkan dengan keberhasilan pendidikan; kesiapan tempat kerja; belajar sepanjang hayat; warga negara yang terinformasi; dan tenaga kerja yang kompetitif (Weiner, 2011).

Literasi informasi perlu dikonseptualisasikan dengan cara yang lebih luas, dengan mempertimbangkan wacana dan praktik diskursif (Lloyd, 2005). Orang yang melek informasi memiliki kesadaran yang mendalam, koneksi, dan kelancaran dengan lingkungan informasi (Lloyd, 2004). Literasi informasi bukan hanya mencakup keterampilan penelitian pustaka dan teknologi informasi, tetapi lebih luas dari itu. Literasi informasi bukan hanya tentang menemukan dan menyajikan informasi, tetapi tentang analisis tingkat tinggi, sintesis, berpikir kritis, dan pemecahan masalah (Lupton, 2004).

2.1.2 Pembelajaran Literasi Informasi

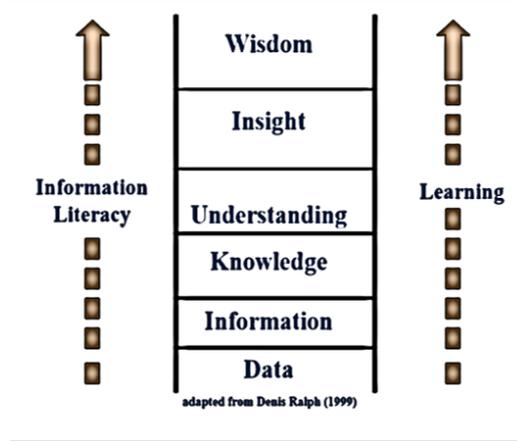
Idealnya, pembelajaran dan praktik literasi informasi terjadi di seluruh kurikulum, dibangun secara progresif di seluruh program akademik sehingga siswa memiliki konteks

disiplin untuk mengembangkan kompetensi (Wang 2011). Praktik literasi informasi berbeda-beda, tergantung konteks atau disiplin ilmunya (Walter 2007). Literasi informasi berkaitan dengan berpikir kritis (Weiner, 2011), digital, media, dan literasi lainnya (Garner 2006).

Pembelajaran di kelas seharusnya menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa yang memfokuskan kegiatannya pada pemecahan masalah dan berpikir kritis. Lingkungan belajar seperti itu membutuhkan kompetensi literasi informasi. Pembelajaran literasi informasi dapat meningkatkan kemandirian siswa, karena mereka terlibat dalam menggunakan berbagai sumber informasi untuk memperluas pengetahuan mereka, mengajukan pertanyaan yang terinformasi, dan mempertajam pemikiran kritis mereka untuk pembelajaran mandiri lebih lanjut.

Untuk memanfaatkan sepenuhnya pembelajaran berbasis masalah, siswa harus sering menggunakan keterampilan berpikir yang mengharuskan mereka untuk menjadi pengguna terampil sumber informasi di banyak lokasi dan format, sehingga meningkatkan tanggung jawab mereka untuk pembelajaran mereka sendiri. Untuk mendapatkan informasi yang mereka cari untuk penyelidikan mereka, individu memiliki banyak pilihan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan sistem temu kembali informasi, seperti yang dapat ditemukan di perpustakaan atau dalam database yang dapat diakses oleh komputer dari lokasi manapun. Pilihan lain adalah memilih metode investigasi yang tepat untuk mengamati fenomena secara langsung.

Literasi informasi membentuk dasar untuk pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini umum untuk semua disiplin ilmu, untuk semua lingkungan belajar, dan untuk semua tingkat pendidikan. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk menguasai konten dan memperluas penyelidikan mereka, menjadi lebih mandiri, dan mengambil kendali yang lebih besar atas pembelajaran mereka sendiri.



Diadopsi dari Denis Ralph (1999)

Seorang individu yang melek informasi mampu: (1) menentukan sejauh mana informasi yang dibutuhkan; (2) mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien; (3) mengevaluasi informasi dan sumbernya secara kritis; (4) memasukkan informasi yang dipilih ke dalam basis pengetahuan seseorang; (5) menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu; (6) memahami masalah ekonomi, hukum, dan sosial di sekitar; dan (7) penggunaan informasi, dan mengakses serta menggunakan informasi secara etis dan sah.

Willison & O'Regan (2005) mengusulkan satu pendekatan untuk pembelajaran literasi informasi yang lebih holistik dengan memahaminya dalam hal pembelajaran sepanjang hayat, yaitu melihat pembelajaran sebagai sesuatu yang terjadi terus menerus selama rentang hidup. Perkembangan pembelajaran sepanjang hayat semakin dilihat sebagai fungsi penting dari lembaga pendidikan. Jika pembelajaran adalah sesuatu yang terjadi terus menerus sepanjang hidup, dan jika literasi informasi diperlukan untuk pembelajaran mandiri terjadi, maka literasi informasi juga harus berkembang terus menerus untuk mendukung dan memfasilitasi pembelajaran.

Amram et al. (2020) menyajikan tiga pendekatan untuk pembelajaran literasi informasi. Pertama, pendekatan terintegrasi, yaitu bahwa TIK dan literasi informasi harus diintegrasikan di semua disiplin ilmu. Pendekatan ini diterapkan di banyak sistem pendidikan, termasuk di Israel. Kedua, pendekatan langsung, yaitu TIK dan literasi informasi dianggap sebagai bidang

yang unik dengan konten dan tujuan yang ditetapkan yang melampaui mata pelajaran tertentu dari studi dan memberikan keterampilan, alat, dan cara berpikir yang dapat diterapkan dalam konteks baru. Oleh karena itu, kurikulum khusus untuk bidang ini harus dikembangkan dengan bantuan alat digital. Dengan cara ini, keterampilan teknologi akan diperoleh saat belajar literasi informasi. Kurikulum yang paling terkenal adalah “The Big 6”—model yang telah diterima di beberapa negara bagian di Amerika Serikat (Eisenberg et al., 2004). Ketiga, pendekatan pendukung, yaitu TIK dan literasi informasi dan pengetahuan yang diperoleh diberikan sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan belajar, dengan peran ditugaskan kepada guru-pustakawan. Metode ini ditemukan di Finlandia dan berbagai institusi pendidikan di Amerika Serikat (Farmer dan James, 2008).

AASL dalam *The information Power: Building partnership for learning* (1998) menyatakan bahwa pengajaran yang efektif harus dilihat sebagai proses holistik yang melibatkan setiap aspek kehidupan siswa. Pengajaran yang efektif membutuhkan penilaian dan tanggapan yang berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih bermakna. Berbagai pendekatan dan metodologi pengajaran telah dicoba, digunakan dan didiskusikan dalam berbagai penelitian untuk mengajarkan literasi informasi, terutama melalui penugasan berbasis sumber daya. Di antara beberapa pendekatan pengajaran yang umum digunakan adalah: (a) scaffolding (Jackson, 2006; Lundhand Limberg 2008), (b) coaching (Mokhtar dan Majid (2006); dan Mokhtar, Foo dan Majid (2007), dan (c) tutor dan fasilitator (Barrow 1998; Macklin 2001. Hannafin dkk. (1994) dan Hill dan Hannafin (2001) membahas empat jenis scaffolds: (a) scaffolds konseptual, yang membantu siswa untuk memahami topik yang mereka pelajari, (b) scaffolds meta-kognitif, yang mendorong siswa untuk memikirkan pekerjaan mereka, (c) perancah prosedural, yang membantu siswa untuk mengetahui bagaimana melanjutkan, dan (d) perancah strategis, yang memberikan cara alternatif untuk menyelesaikan pekerjaan. Sejumlah kerangka literasi informasi telah dikembangkan, menggunakan kombinasi perancah meta-

kognitif dan prosedural untuk membimbing siswa melalui langkah-langkah proses penelitian (Eisenberg dan Berkowitz 2006; Stripling dan Pitts 1998).

Sementara itu, karya Mokhtar dan Majid (2006) dan Mokhtar, Foo dan Majid (2007) cukup membuktikan bahwa pelatihan literasi informasi dapat berhasil dilaksanakan melalui pembinaan yang dipersonalisasi. Temuan mereka menunjukkan bahwa pendekatan tersebut berkontribusi terhadap pengembangan literasi informasi dan memproyeksikan kualitas kerja yang lebih baik. Mereka menganjurkan pembinaan pribadi sebagai pedagogi yang tepat untuk meningkatkan pembelajaran dan untuk mengembangkan kompetensi literasi informasi di kalangan siswa.

Pendekatan pengajaran lain yang dianjurkan oleh para peneliti untuk mengajarkan literasi informasi adalah 'memfasilitasi'. Macklin (2001) misalnya, mendorong guru untuk menjadi fasilitator dalam mengajarkan literasi informasi melalui kerja proyek dan menguraikan beberapa peran yang diharapkan dari mereka. Mereka sedang mengatur masalah/situasi, menyeimbangkan siswa-arah dengan bantuan, menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, dan merangsang evaluasi kritis dari ide-ide. Barrows (1998) juga membahas beberapa peran yang dapat dimainkan guru dalam mengajar literasi informasi melalui pembelajaran berbasis sumber daya yang mencakup menjadi tutor dan fasilitator, yaitu mereka membimbing peserta didik untuk inkuiri dan belajar mandiri. Peneliti menegaskan bahwa tutor atau fasilitator tidak memberikan arahan untuk memecahkan masalah, melainkan membiarkan siswa menemukan jalan mereka sendiri untuk memecahkan masalah mereka. Mereka juga menambahkan bahwa metode fasilitasi dan pembinaan adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk mengajarkan literasi informasi melalui tugas belajar.

2.1.3 Asesmen Literasi Informasi

Mengacu pada *American Library Association* (2000), asesmen literasi informasi memuat lima standar dan dua puluh dua indikator kinerja. Dalam menerapkan standar-standar ini, perlu dipertimbangkan tingkat keterampilan berpikir yang berbeda terkait dengan berbagai hasil pembelajaran, dan karenanya instrumen atau metode yang berbeda sangat penting untuk menilai hasil tersebut. Lima standar tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, siswa yang melek informasi menentukan sifat dan luasnya informasi yang dibutuhkan. Indikator kinerjanya adalah (1) Siswa yang melek informasi mendefinisikan dan mengartikulasikan kebutuhan akan informasi; (2) Siswa yang melek informasi mengidentifikasi berbagai jenis dan format sumber informasi potensial; (3) Siswa yang melek informasi mempertimbangkan biaya dan manfaat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. (4) Siswa yang melek informasi mengevaluasi kembali sifat dan tingkat kebutuhan informasi.

Kedua, siswa yang melek informasi mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Indikator kinerjanya adalah (1) Siswa yang melek informasi memilih metode investigasi atau sistem temu kembali informasi yang paling tepat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. (2) Siswa yang melek informasi membangun dan menerapkan strategi pencarian yang dirancang secara efektif; (3) Siswa yang melek informasi mengambil informasi secara online atau secara langsung dengan menggunakan berbagai metode; (4) Siswa yang melek informasi menyempurnakan strategi pencarian jika perlu; (5) Siswa yang melek informasi mengekstrak, mencatat, dan mengelola informasi dan sumbernya.

Ketiga, siswa yang melek informasi mengevaluasi informasi dan sumbernya secara kritis dan menggabungkan informasi yang dipilih ke dalam basis pengetahuan dan sistem nilainya. Indikator kinerjanya adalah (1) Siswa yang melek informasi merangkum ide-ide utama yang akan digali dari informasi yang dikumpulkan; (2) Siswa yang melek informasi

mengartikulasikan dan menerapkan kriteria awal untuk mengevaluasi baik informasi maupun sumbernya; (3) Siswa yang melek informasi mensintesis ide-ide utama untuk membangun konsep-konsep baru; (4) Siswa yang melek informasi membandingkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya untuk menentukan nilai tambah, kontradiksi, atau karakteristik unik lainnya dari informasi tersebut; (5) Siswa yang melek informasi menentukan apakah pengetahuan baru berdampak pada sistem nilai individu dan mengambil langkah untuk mendamaikan perbedaan; (6) Siswa yang melek informasi memvalidasi pemahaman dan interpretasi informasi melalui wacana dengan individu lain, ahli bidang subjek, dan/atau praktisi; (7) Siswa yang melek informasi menentukan apakah pertanyaan awal harus direvisi.

Keempat, siswa yang melek informasi, secara individu atau sebagai anggota kelompok, menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Indikator kinerjanya adalah (1) Siswa yang melek informasi menerapkan informasi baru dan sebelumnya untuk perencanaan dan pembuatan produk atau kinerja tertentu; (2) Siswa yang melek informasi merevisi proses pengembangan produk atau kinerja; (3) Siswa yang melek informasi mengkomunikasikan produk atau kinerja secara efektif kepada orang lain.

Kelima, siswa yang melek informasi memahami banyak masalah ekonomi, hukum, dan sosial seputar penggunaan informasi dan mengakses serta menggunakan informasi secara etis dan legal. Indikator kinerjanya adalah (1) Siswa yang melek informasi memahami banyak masalah etika, hukum dan sosial ekonomi seputar informasi dan teknologi informasi; (2) Siswa yang melek informasi mengikuti undang-undang, peraturan, kebijakan kelembagaan, dan etiket terkait akses dan penggunaan sumber informasi; (3) Siswa yang melek informasi mengakui penggunaan sumber informasi dalam mengkomunikasikan produk atau pertunjukan.

2.2 Tinjauan Teori

Ada tiga perspektif teoretis tentang literasi informasi (Limberg, Sundin & Talja, 2012), yaitu: fenomenografi, teori sosiokultural dan analisis wacana. Setiap perspektif tersebut menawarkan wawasan yang berbeda tentang literasi informasi, baik pada tingkat empiris maupun teoritis. Perspektif fenomenografi (Marton et al., 1970) pada dasarnya diarahkan untuk mempelajari variasi cara orang mengalami fenomena yang berbeda. Fenomenografi didasarkan pada pandangan konstruktivis pembelajaran, menekankan pentingnya pemahaman peserta didik, misalnya pemahaman terhadap kredibilitas sumber. Belajar dipandang sebagai kegiatan mengkonstruksi makna, bukan sebagai transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Studi ini memungkinkan kita untuk membandingkan berbagai pandangan literasi informasi dari perspektif yang berbeda, misalnya persamaan dan perbedaan antara perspektif pengajaran dan pembelajaran atau antara guru dan pustakawan.

Perspektif sosiokultural (Vygotsky, 1896-1934), menekankan bahwa pencarian informasi dilakukan untuk tujuan tertentu dalam praktik tertentu, misalnya untuk menulis makalah akademis, dan dengan bantuan alat seperti katalog perpustakaan, database bibliografi atau Google Scholar. Pertanyaan menarik untuk penelitian literasi informasi, paling tidak untuk memahami: Bagaimana orang belajar mencari dan menggunakan informasi, terkait dengan bagaimana praktik dan media digital (dan alat lain untuk berinteraksi dengan informasi) saling bertransformasi? Bagaimana lingkungan digital kontemporer berkontribusi pada pembentukan kondisi untuk belajar? Apa arti alat baru yang digunakan untuk mencari, menilai, dan memediasi informasi, bagi pemahaman kita tentang pengetahuan ahli dan penilaian kritis terhadap sumber, khususnya di mana teks semakin banyak dihasilkan oleh pengguna?

Analisis wacana (Foucault, 1969) tentang literasi informasi bertujuan untuk menangkap cara-cara yang dibentuk secara sosial dan budaya untuk memahami kompetensi informasi dan praktik informasi. wacana didefinisikan sebagai sistem pernyataan yang secara sistematis

membentuk objek yang dibicarakan (kumpulan klaim, asumsi, dan makna yang saling terkait). Wacana-wacana ini pada gilirannya terkait erat dengan formasi pengetahuan sejarah yang lebih umum, misalnya wacana tentang era informasi, sifat informasi, dan sifat teknologi informasi.

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Moore (2000) dan Williams & Wavell (2006) menemukan adanya keterkaitan antara pemahaman guru tentang literasi informasi dan keahlian keterampilan mereka, dengan bagaimana mereka menyampaikan literasi informasi di kelas. Moore (2000) melaporkan kompetensi literasi informasi yang terbatas di antara para guru dalam studinya. Meskipun sebagian besar guru dalam studinya di sekolah Selandia Baru percaya bahwa mereka memiliki pemahaman praktis tentang literasi informasi, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hampir separuh dari mereka tidak terbiasa dengan proses detail menemukan dan menggunakan informasi. Hal ini menunjukkan kurangnya kompetensi mereka untuk mengajarkan literasi informasi.

Di antara beberapa studi terbaru yang mencoba memahami hubungan antara pemahaman guru tentang literasi informasi dan bagaimana mereka melaksanakan instruksi kelas adalah oleh Smith (2013). Smith menegaskan bahwa lingkungan dan pengalaman pribadi guru bertanggung jawab dalam membentuk instruksi mereka. Dia menjelaskan bahwa guru membawa banyak pengalaman, pengetahuan profesional yang unik, dan asumsi mereka sendiri ke dalam kelas. Temuannya juga menunjukkan adanya kebingungan guru seputar istilah literasi informasi. Studi lebih lanjut (Bawi 2002; dan Hart 2000) menunjukkan bahwa guru mata pelajaran hanya fokus pada materi pelajaran tugas siswa mereka, dan tidak membahas elemen literasi informasi. Jackson (2006), Julien dan Barker (2009), juga Williams dan Wavell (2006) mengungkapkan bahwa guru tidak mengajarkan informasi karena mereka sendiri belum tentu terlatih dalam keterampilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian evaluatif. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Model evaluasi CIPP dipilih karena aspek yang ditinjau dalam model penelitian ini dianggap lebih komprehensif dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Terdapat empat aspek evaluasi dalam model CIPP, yaitu evaluasi *context* yang meliputi latar belakang pembelajaran literasi informasi, evaluasi *input* yang meliputi sumber daya yang mendukung terlaksananya pembelajaran literasi informasi, evaluasi *process* yaitu evaluasi pelaksanaan pembelajaran literasi informasi, dan evaluasi *product* yaitu evaluasi hasil dari pelaksanaan pembelajaran literasi informasi.

3.2 Lokasi/Tempat dan Waktu Evaluasi

Penelitian ini dilakukan di 14 Madrasah Aliyah yang ada di Jawa Barat yaitu: MAN 2 Kota Cirebon; MAN 2 Cirebon; MAN 1 Cirebon; MAN 1 Kuningan; MAS Husnul Khotimah; MAN 1 Ciamis; MAN 1 Kota Tasikmalaya; MAN 1 Garut; MAS Al-Quran Kudang; MAN 2 Kota Bandung; MAS Nurul Falah Soreang; MAN 1 Cianjur; MAN 2 Kota Bogor; dan MAN 3 Bekasi. Penelitian dilakukan selama 4 bulan, dimulai pada bulan Agustus sampai November 2021.

3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumentasi

Variabel data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan instrumen yang diperlukan untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Data	Sub Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen
Konteks pembelajaran literasi informasi	Peluang dan kebutuhan madrasah dalam menghadapi era informasi	Kepala madrasah	Bertanya	Kuesioner
Input pembelajaran literasi informasi	Kesiapan guru dalam pembelajaran literasi informasi	Guru madrasah	Pengukuran	Skala kesiapan
	Sarana dan Prasarana pendukung pembelajaran literasi informasi	Kepala madrasah/ Guru madrasah	Bertanya	Kuesioner
Proses pembelajaran literasi informasi	Perencanaan pembelajaran	Guru madrasah	Analisis dokumen	Dokumen rencana pembelajaran (<i>lesson plan</i>)
	Pelaksanaan pembelajaran	Guru madrasah	Bertanya	Kisi-kisi angket/kuisisioner
Produk pembelajaran literasi informasi	Kemampuan literasi informasi siswa	Siswa madrasah	Pengukuran	<i>Situational Judgment Test (SJT)</i>

3.4 Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber data, triangulasi waktu pengumpulan data, dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan keterangan yang berasal dari informan satu dengan informan lainnya. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara membandingkan keterangan yang diperoleh dari informan pada satu kesempatan dengan kesempatan lainnya (dua waktu yang berbeda). Sementara triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan keterangan yang diperoleh melalui dokumen (dua teknik pengumpulan data yang berbeda).

3.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan menurut Miles & Huberman yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data atau reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data. Langkah ini memerlukan sensitifitas dan pemikiran kritis serta wawasan yang luas. Ringkasan data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian (naratif), tabel, bagan, gambar dan atau grafik. Selanjutnya, temuan tersebut didiskusikan (dianalisis) menggunakan landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, dan juga kerangka pikir yang dibangun peneliti, untuk membuat kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Tentang Madrasah di Jawa Barat

Madrasah sebagai sebuah institusi Pendidikan Islam di Indonesia (waktu itu masih *Nederland Indies*) baru muncul pada awal abad ke 20. Kemunculan madrasah ini tidak lepas dari berbagai perubahan yang terjadi saat itu berikut tantangan yang mengiringinya. Paling tidak ada 2 tantangan yang dihadapi masyarakat Islam saat itu. Pertama adalah lahirnya kebijakan politik etis yang salah satunya mendorong perbaikan dan perluasan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi. Kebijakan ini diwujudkan dengan pendirian sekolah-sekolah rakyat sampai ke tingkat desa. Sekolah rakyat ini merupakan upaya revisi atas kebijakan sebelumnya yang hanya memberikan kesempatan Pendidikan bagi pribumi kalangan atas dan keberadaannya juga terbatas. Namun bagi para aktivis Pendidikan Islam, pendirian sekolah rakyat secara massif ini dikhawatirkan akan menjadi media yang efektif untuk upaya sekularisasi dan westernisasi anak-anak muda Muslim. Tantangan kedua adalah menurunnya minat anak-anak muda Muslim untuk menempuh pendidikan di Lembaga-lembaga Pendidikan Islam yang ada seperti *musholla*, *langgar* dan *pesantren*. Wajah tradisionalitas atau lebih tepatnya “*kekolotan*” dari Lembaga-lembaga Pendidikan Islam tersebut menjadi salah satu alasan utamanya. Melihat hal tersebut bisa dikatakan bahwa madrasah merupakan anak perubahan sekaligus jawaban atas tantangan yang dilahirkannya (Dedi Sahputra, 2018: 155-158).

Nampaknya “*ijtihad*” para ulama awal abad ke 20 tersebut bisa dikatakan berhasil, jika pada *dakade* pertama dan kedua abad ke 20 hanya beberapa madrasah saja yang muncul seperti madrasah adabiyah di Sumatra dan *Mathla’ul Anwar* di Banten, pada *decade* berikutnya

madrasah berkembang secara pesat. Misalnya Madrasah Mathla'ul Anwar yang berdiri pada tahun 1916 di Menes, Banten telah memiliki cabang lebih dari 40 cabang yang tersebar di berbagai wilayah mulai Banten, Bogor bahkan Karawang pada pertengahan tahun 1930-an. (Rosidin, 2007). Suburnya pertumbuhan madrasah telah mendorong Nahdhatul Ulama (NU) untuk secara khusus membahasnya pada kongres nasionalnya pada tahun 1930 (Mahrus As'ad, 2014:71). Singkatnya, madrasah telah berkembang pesat menjelang kemerdekaan Indonesia.

Melihat fakta tersebut di atas, tidaklah mengherankan jika pada saat perumusan peraturan awal tentang sistem pendidikan bagi Indonesia merdeka, madrasah menjadi salah satu *locus* utama perhatian dalam konteks pendidikan Islam sebagaimana tertuang dalam UU no. 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Akmal Hawi, 2017:2). Hal ini menarik mengingat bahwa secara historis, madrasah bukanlah lembaga pendidikan Islam awal yang berdiri dan berkembang di wilayah Indonesia atau Netherland Indies seperti halnya pesantren, meunasah, langar ataupun surau. Hal ini menunjukkan signifikannya pengaruh sekaligus pesatnya perkembangan madrasah di Indonesia sejak awal kemunculannya pada awal abad ke 20.

Meskipun demikian, kedudukan madrasah yang cukup signifikan di kalangan masyarakat Muslim nyatanya masih belum cukup mendorong para pengambil kebijakan untuk menempatkan madrasah sejajar dengan lembaga Pendidikan umum lainnya. Terkait hal itu, ada satu analisa yang melihat beragamnya model pendidikan dan kurikulum pengajaran di madrasah menjadi salah satu faktor belum berhasilnya menempatkan kesejajaran antara madrasah dan sekolah umum. Selama berpuluh-puluh tahun paska Indonesia merdeka, persepsi madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua jika dihadapkan pada sekolah umum terus berlangsung. Hal itu diperparah oleh fakta bahwa kualitas pengajaran dan *output* madrasah memang relatif lebih rendah dibandingkan sekolah umum (Khoirul Huda, 2016:319).

Meskipun demikian, kondisi yang “jomplang” ini berangsur-angsur berubah seiring dengan semakin intensifnya madrasah melakukan reformasi dan perbaikan. Dalam hal ini, Kementerian Agama RI berperan aktif dalam proses ini dengan berbagai kebijakan dan insentif yang diberikan. Langkah awal untuk mensejajarkan antara madrasah dengan sekolah umum adalah melalui “penyamaan” kurikulum utama dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan Islam. Hal itu dilakukan ketika dikeluarkannya SKB 3 Menteri pada tahun 1975. Kebijakan ini memunculkan prosentase komposisi materi ajar dengan 70% umum dan 30% agama. Materi ajar terakhir ini sangat krusial guna mempertahankan ciri khasnya (Muhammad Yusuf, 2019: 140-141). SKB ini kemudian diperkuat 14 tahun kemudian dengan munculnya UU no. 2 tahun 1989. Kesetaraan kedudukan akhirnya ditegaskan dalam peraturan yang lebih tinggi lagi melalui UU tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) no. 02 tahun 2003 (Mohammad Kosim, 2007:57).

Merujuk pada UU No.20 tahun 2003 pasal 17 dan 18 tentang Sisdiknas mengenai kesetaraan pendidikan umum dan madrasah dalam Sisdiknas. Kesetaraan yang dimaksud tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.66 tahun 2010 pasal 1 butir ke-14. Misalnya Madrasah Aliyah (MA) didefinisikan sebagai sekolah umum tingkat menengah yang berciri khas Islam (Mahdalena, 2017:120). Dengan status sebagai sekolah umum, MA memiliki kedudukan yang sama dalam segala aspeknya dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kesetaraan status ini menjadi modal yang sangat berharga untuk mulai secara bertahap membangun reputasi yang baik, bahkan lebih baik, dari sekolah umum lainnya di mata masyarakat.

Pada kenyataannya, kedudukan yang setara ini sudah dinikmati oleh MA dengan dibuktikan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk mengirimkan putra putri mereka untuk dididik di MA. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa jumlah siswa MA masih sangat tinggi. Pada tahun 2020 misalnya jumlah sebanyak 9.450.198 siswa. Selain itu, dapat dilihat juga dari

jumlah MA yang ada di Indonesia sebanyak 8.807, dengan komposisi 802 berstatus Negeri dan 8.005 berstatus swasta (Emis Pendis Kementerian Agama RI,2020).

Lebih jauh dari itu, kebijakan mengenai MA sebagai lembaga pendidikan formal yang setara dengan sekolah lain dan menjadi bagian dari Sisdiknas ini tentu menjadi angin segar bagi MA. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah telah memperhatikan dan mengapresiasi keberadaan MA. Kebijakan tersebut juga menjadi satu peluang bagi MA yang berkesempatan untuk mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Peluang tersebut tentunya diiringi dengan tuntutan bahwa MA harus mampu mengejar ketertinggalannya yang dulu diposisikan sebagai kelas kedua, baik secara kualitas, kapasitas dan reputasinya. Sehingga madrasah harus menata juga infrastruktur dan suprastrukturnya agar mampu memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat sebagaimana sekolah-sekolah lainnya. Dorongan pemerintah untuk terus memosisikan kesejajaran MA dengan sekolah lainpun terus dilakukan diantaranya dengan membuat program madrasah unggulan dan madrasah percontohan seperti Madrasah Insan Cendekia. Sementara itu, peningkatan kapasitas MA juga dilakukan dalam bentuk program MA Plus dimana MA selain menyelenggarakan beberapa jenis peminatan seperti IPS, IPA dan Agama, akan tetapi juga diperkaya oleh program tambahan dalam bentuk kurikulum tertentu. Menariknya jumlah MA Plus ini terus bertambah. Misalnya pada tahun 2016 terdapat 234 MA Plus, sementara pada tahun 2020 terdapat 341 buah. Artinya hanya dalam kurun waktu mereka, jumlah MA Plus dirata-rata meningkat lebih dari 25 buah MA Plus (M. Maskur,2017:112).

Berbagai dorongan pemerintah tersebut disambut baik oleh MA dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Peran madrasah Aliyah sebagai Lembaga Pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum, tapi juga ilmu-ilmu agama sebagai ciri khasnya terus diupayakan keberhasilannya. Madrasah kini tidak hanya dipandang sebagai lembaga yang

mentransmisi ilmu-ilmu agama Islam, namun lebih dari itu juga menumbuhkan apresiasi dan penguasaan keterampilan sains-teknologi. Hal ini kemudian terjawab dengan keberhasilan sepuluh siswa MA binaan Kementerian Agama menerima penghargaan dalam ajang Prestasi Talenta Indonesia 2020 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Dalam kompetensi ini siswa-siwi MA meraih prestasi di tingkat nasional dalam berbagai bidang seperti bidang Kimia, Biologi, Fisika, Astronomy and Astrophysics (Bashori,2017:288).

Perkembangan MA yang tersebar di Indonesia termasuk di Jawa Barat tentu tak luput dari bahan kajian. Melihat Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat pengembangan Islam di Indonesia. Kemunculan Madrasah di Jawa Barat diawali dengan pendirian Madrasah Muallimin yang didirikan oleh Persatuan Umat Islam (yang saat itu masih bernama Perhimpunan Hayatul Qulub) pada tahun 1923. Perhimpunan Hayatul Qulub ini mendirikan dan mengelola Lembaga Pendidikan yang memang mengadopsi sistem Pendidikan pesantren dan sekolah. Dalam pelaksanaannya para santri selain belajar di surau pada sore sampai malam hari, santri juga didorong untuk mengikuti pelajaran di dalam kelas pada pagi sampai siang hari. Jika pagi sampai- siang hari para santri mempelajari pengetahuan umum dan bahasa asing seperti Bahasa Belanda dan Inggris, maka pada sore hingga malam hari mereka dituntut untuk mempelajari ilmu agama.

Pada saat itu, sistem Pendidikan madrasah semacam itu memang tak lazim dilakukan oleh sekolah Belanda maupun pada pembelajaran di Pesantren. Sehingga dalam waktu yang cukup singkat cabang-cabang Iatanul Muta'alimin (nama Hayatul Qulub/ PUI saat ini) menjadi organisasi yang masyhur dan terkenal sebagai satu-satunya pusat Pendidikan Islam modern di Majalengka. Iatanul Muta'alimin ini kemudian bahkan mengepakkan sayapnya dengan membuka cabang-cabang Madrasah diberbagai daerah seperti, Cirebon, Kuningan, Indramayu, Jatibarang, Bandung, Cianjur bahkan sampai ke Tegal (Jawa Tengah).

Menurut Data Emis Pendis Kementerian Agama RI pada tahun 2020 saat ini jumlah MA yang tersebar di Jawa Barat sebanyak 1.187 berstatus swasta dan 77 berstatus negeri dengan jumlah siswa 96.841 laki-laki dan 127.116 perempuan. Jumlah ini menduduki posisi ke-2 MA terbanyak di Indonesia setelah Jawa Timur. Dilihat dari persebaran MA baik negeri maupun swasta, masing-masing sudah tersebar di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan jumlah yang sama bahkan lebih banyak dari jumlah kecamatan yang ada. Maka data ini menunjukkan bahwa MA semakin diakui perannya dan dipercaya oleh masyarakat dalam meningkatkan kualitas generasi bangsa khususnya di Jawa Barat (Syamsul Kurniawan, 2019:62).

MA khususnya di Jawa Barat telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam mencerdaskan masyarakat dan bangsa khususnya dalam konteks akses dan pemerataan Pendidikan. Biaya Pendidikan di MA yang relative lebih murah dan banyaknya sebaran MA di setiap kecamatan yang berarti menunjukkan mudahnya akses menempuh jarak MA menjadi alasan madrasah Aliyah menjadi Lembaga Pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Selain itu, dengan terus berkembangnya MA di Jawa Barat maka peran MA pun juga dilihat dari segi bagaimana ia menjadi jawaban atas krisis moral yang dihadapi di era seperti sekarang ini. MA dapat menyelenggarakan pendidikan yang mendorong pada pembentukan karakter, mendidik manusia seutuhnya, akal dan hatinya, ruhani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya (Khoirul Huda, 2016:320).

Dalam konteks kekinian image MA dan Lembaga pendidikan keagamaan lainnya telah berubah, karena kini MA tidak hanya diminati oleh kalangan menengah ke bawah tetapi juga kalangan menengah ke atas. Apalagi kini pembelajaran di beberapa MA di Jawa barat didukung dengan pengembangan Bahasa Asing (English/Arabic Daily) dan digitalisasi pembelajaran yang menjadi syarat berkembangnya ilmu pengetahuan. Seperti yang telah dilakukan oleh

beberapa MA di Jawa Barat diantaranya MA Husnul Khotimah Kuningan, MAN 2 Kota Bandung, MAN 1 Ciamis.

Jika pada awal berdirinya perkembangan madrasah terhambat dan memiliki banyak tantangan berupa kebijakan-kebijakan pemerintahan, maka dalam perkembangan selanjutnya peran madrasah didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah sudah mengapresiasi keberadaan madrasah melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak dan bisa dikatakan adil terhadap madrasah serta Lembaga Pendidikan keagamaan. Di Jawa Barat sendiri hal ini dapat terlihat dari adanya upaya Gubernur dengan elemen-elemen pemerintahan dalam merumuskan Raperda Pendidikan Keagamaan, meskipun Raperda ini ditarik kembali karena saran dari Kemendagri dan DPR RI, raperda ini harus menunggu kebijakan ditetapkannya UU Pesantren. Tujuan di rumuskannya Raperda tentang Pendidikan Keagamaan ini dalam rangka menjamin fasilitas, sarana dan prasarana penyelenggaraan Pendidikan, memperkuat aspek kelembagaan Pendidikan keagamaan, juga untuk meningkatkan SDM tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan. Selain itu, bentuk perhatian pemerintah terhadap MA dalam konteks pengembangan mutu dilakukan juga melalui program bantuan Dana Operasional Pendidikan bagi Madrasah termasuk Madrasah Aliyah.

Berbagai bentuk upaya dukungan pemerintah tersebut tentu juga menuntut MA di Jawa Barat harus terus melakukan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang berarti bahwa madrasah harus menjadikan dirinya sebagai Lembaga pendidikan yang mampu memberikan pelayanan dan kepuasan bagi umat islam khususnya. Di era ini kebutuhan utama umat Islam dan masyarakat secara umum memang hal-hal yang identic dengan keagamaan dan moral. Namun demikian, bukan berarti MA hanya berorientasi pada aspek ukhrawi, tapi juga harus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat global (Eriyanto, 2019:74).

Menindaklanjuti perkembangan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin kompleks, MA harus tetap survive dan beradaptasi dengan cepat, menyesuaikan peradaban baru yang

semakin dahsyat di abad 21. Memasuki abad 21 terjadi digitalisasi sebagai dampak dari evolusi teknologi (terutama informasi dan komunikasi). Abad ini menuntut madrasah agar membekali siswanya dengan keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 ini meliputi keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, kolaborasi, serta komunikasi. Selain itu, siswa juga perlu menguasai pengetahuan konten dan sikap ilmiah, memiliki literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi informasi dan komunikasi. Karena abad ini mengharuskan manusia-manusianya agar cakap teknologi dan cakap dalam menyikapi ledakan-ledakan informasi. Sehingga madrasah-madrasah termasuk di Jawa Barat perlu untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, baik dalam konteks manajemen pendidikan maupun dalam proses pembelajarannya (Syamsul Kurniawan, 2019:56).

Reformasi konteks manajemen pendidikan dan proses pembelajaran dalam rangka membekali siswa dengan keterampilan abad 21 tentu harus didukung dengan kurikulum, SDM dan sarana yang memadai. Kurikulum pendidikan madrasah saat ini harus disesuaikan dengan “selera” abad 21. Yakni kurikulum yang mendorong siswanya untuk mencari tahu dari berbagai sumber belajar yang didukung dengan literasi informasi dan literasi media. Selain itu juga memfasilitasi pembelajaran yang mengarahkan siswa mampu berfikir kritis-analitis, tidak hanya mampu menyelesaikan masalah tetapi juga mampu merumuskan masalah. Namun demikian, kerangka keterampilan abad 21 saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan karakter kuat (seperti bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif, adaptif, dan seterusnya. (Eriyanto, 2019:76).

Kurikulum yang memang sudah dibuat dengan “selera” abad 21 tentu harus diimplementasikan oleh Sumber daya manusia madrasah yang mendukung. Dalam hal ini yaitu tenaga pendidik dan kependidikan. Menghadapi tantangan-tantangan abad 21, harus dilakukan revolusi mental tidak hanya pada siswa saja, tetapi juga guru-guru madrasah. Dari mental guru yang selama ini tidak memberikan ruang pengembangan potensi kepada siswanya menjadi guru

yang lebih banyak memberi ruang-ruang dialog untuk siswa sehingga menjadi kreatif dan dinamis. Guru madrasah abad 21 sudah seharusnya menyadari bahwa posisinya saat ini adalah sebagai fasilitator pembelajaran, yang berperan sebagai penasihat, pembimbing atau pemandu daripada rujukan otoriter yang tak bisa dibantah di kelas. Selain itu, guru harus pula memfasilitasi siswa dengan pembelajaran berbasis teknologi didukung dengan kemampuan literasi informasi dan literasi lainnya untuk mendorong terjadinya pembelajaran yang mengarahkan siswa pada keterampilan abad 21 (Emmeria Trihoran, 2019:54). Madrasah dikatakan berhasil jika mampu menyiapkan lulusan-lulusan madrasah yang siap bersaing pada abad ini. Dan itu semua tergantung dari sejauhmana kemampuan guru-guru di madrasah dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan yang tepat untuk bisa *survive*. Hal yang kemudian menjadi pendukung lain adalah sarana dan prasarana madrasah. Dalam pembelajaran abad 21, teknologi dan informasi serta daya dukung seperti alat komunikasi (hp, laptop) dan jaringan menjadi bagian yang sangat penting.

4.1.2 Kebijakan Madrasah Menghadapi Era Informasi

Kebijakan madrasah dapat dikenali melalui rumusan visi, misi, serta program-programnya. Bukan hanya yang tertulis, tetapi lebih dari itu adalah yang dilaksanakan. Visi madrasah memberikan gambaran yang jelas tentang nilai dan tujuan madrasah. Dengan menguraikan apa yang ingin dicapai madrasah, masyarakat madrasah (guru, siswa, keluarga, dan administrator) dapat bekerja sama dalam arah yang sama menuju pertumbuhan. Dengan menguraikan secara luas tujuan dan nilai-nilai madrasah, akan memotivasi dan menyatukan semua orang untuk menjadi yang terbaik, bukan hanya siswa. Uraian berikut mendeskripsikan hasil wawancara bersama kepala madrasah.

Kegiatan dan media pembelajaran literasi informasi tidak banyak ditemukan di madrasah. Dari 14 Kepala Madrasah yang diwawancarai, ada dua madrasah yang paling

banyak menggambarkan adanya kegiatan dan media yang dapat mendorong pembelajaran literasi informasi, yaitu MAN 1 Cianjur dan MAS Husnul Khotimah. Petikan keterangannya adalah sebagai berikut.

“Kegiatan literasi seminggu sekali, 3 pojok baca di sudut sekolah, Perpustakaan Mini di tiap kelas, kegiatan literasi digital bekerjasama dengan Kominfo. Kelas X 3 guru profesional di bidang IT, Kelas XI pengembangan literasi digital dan Kelas XII pengembangan kecakapan digital” –MAN 1 Cianjur

“Menyiapkan sarana prasarana (6 lab komputer dengan internet 600 MB, 2 Perpustakaan dengan jumlah buku 5000 eksemplar, 2 media koran, Akses Wifi tiap kelas, Proyektor dan LCD), mengembangkan Mading oleh OSIS dengan fokus pada tema Olahraga, Politik dan Keagamaan, Adanya Komunitas Lingkaran Pena, Jurnalistik, Kelompok Ilmiah Remaja, Klub Pencinta Buku, Menerbitkan Majalah Pondok, Gen-Q (Putri) dan Aqias (Putra), Perpustakaan Digital dan Pembelajaran E-Learning” – **MAS Husnul Khotimah**

Banyak tantangan (sekaligus peluang) dalam menyiapkan generasi yang siap menghadapi kehidupan di era informasi. Apa sajakah modal yang telah dimiliki madrasah dalam menghadapi tantangan tersebut? Hasil wawancara menemukan dua madrasah (dari 14 madrasah yang diteliti) yang jawabannya paling menggambarkan adanya kepemilikan modal yang mendukung pembelajaran literasi informasi, yaitu MAS Husnul Khotimah dan MAN 2 Cirebon. Petikan keterangannya adalah sebagai berikut.

“Penyediaan fasilitas teknologi informasi (perpustakaan digital dan digitalisasi pembelajaran)”–MAS Husnul Khotimah

“Perpustakaan digital Airlangga”–**MAN 2 Cirebon**

Ketika ditanyakan tentang hambatan atau kesulitan yang mungkin dialami madrasah dalam mengembangkan pembelajaran literasi informasi, ada jawaban menarik dari dua madrasah yaitu MAN 2 Cirebon dan MAN 1 Kuningan. Petikan keterangannya adalah sebagai berikut.

“Wadahnya sudah, isinya belum.”–**MAN 2 Cirebon**

“Guru kurang serius dalam menyiapkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.” – **MAN 1 Kuningan**

Ketika ditanyakan tentang kiat dan strategi madrasah dalam menghadapi tantangan era informasi, jawaban yang menarik perhatian diberikan oleh MAN 2 Kota Bandung, MAN 2

Kota Bogor, MAN 1 Kota Tasikmalaya, dan MAN 1 Kuningan. Petikan keterangannya adalah sebagai berikut.

“Cakap digital, pendidikan karakter.”–**MAN 2 Kota Bandung**

“Membangun komitmen.”–**MAN 2 Kota Bogor**

“Penekanan pada aspek manajerial, supervisi, evaluasi, tindak lanjut.”–**MAN 1 Kota Tasikmalaya**

“Workshop untuk guru terkait pembelajaran-pembelajaran dengan media-media yang menyenangkan.”–**MAN 1 Kuningan**

Ketika ditanyakan “Apakah kiat dan strategi madrasah dalam menghadapi tantangan era informasi tersebut termuat dalam visi madrasah?”, sebagian besar madrasah menunjukkan adanya rumusan visi yang secara tersirat menuju pada terwujudnya pembelajaran yang adaptif sesuai dengan perkembangan jaman. Misalnya visi MAN 2 Kota Cirebon, “*Cerdas, Religius, Mandiri, Kompetitif (4.0)*”. Beberapa madrasah telah memiliki program khusus yang mendukung penyiapan generasi yang cakap di era teknologi informasi. Misalnya adalah sebagai berikut.

“Upgrading IT Webinar Cakap Digital, Ekskul IT, Kompetisi Science.”– **MAN 2 Kota Bandung**

“Kajian-kajian riset.”–**MAN 1 Kota Tasikmalaya**

“Kolom guru menulis, kompetisi menulis, peningkatan SDM di bidang ekstrakurikuler.”–**MAS Husnul Khotimah**

“ISC (*Inclusive Science Club*)”–**MAN 1 Ciamis**

“Program Jurnalistik.”–**MAN 2 Kota Cirebon**

4.1.3 Kesiapan Guru Madrasah dalam Pembelajaran Literasi Informasi

Penelitian tentang kesiapan guru madrasah dalam pembelajaran literasi informasi diawali dengan identifikasi konsepsi guru terhadap literasi informasi itu sendiri. Hasil identifikasi menemukan bahwa sebagian besar guru memiliki konsepsi literasi informasi sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Para guru berbicara tentang keterampilan TIK dan kelas TIK di madrasah untuk menggambarkan literasi informasi. Namun, istilah TIK secara terbatas dipahami sebagai keterampilan komputer pengolah kata dan keterampilan mencari informasi Internet. Literasi informasi juga dikonsepsikan sebagai penggunaan

berbagai sumber daya. Melalui konsepsi ini, guru melihat proyek sebagai platform bagi siswa untuk terlibat dan menggunakan berbagai sumber daya.

Hanya sedikit guru yang memiliki konsepsi literasi informasi sebagai penerapan informasi untuk menghasilkan pengetahuan baru berkisar pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang materi pelajaran melalui penggunaan informasi. Demikian juga konsepsi literasi informasi sebagai pengalaman penelitian, seperti mengumpulkan pengalaman data primer, mengembangkan keterampilan menulis penelitian, dan menawarkan siswa untuk belajar melalui pengalaman.

Studi ini juga menemukan adanya kesenjangan antara konsepsi dan praktik penerapannya. Banyak guru melihat perangkat teknologi informasi sebagai alat yang efektif untuk mengelola pembelajaran literasi informasi, tetapi tidak selalu berarti menggunakannya. Beberapa penyebabnya adalah terkait dengan dukungan perangkat, akses, pengetahuan, keterampilan, dan komitmen.

Guru muda, yang lahir di era informasi dan dianggap sebagai "*digital natives*" ternyata juga tidak selalu dengan mudah beradaptasi dengan metode pembelajaran inovatif yang menggabungkan penggunaan teknologi. Tahun kelahiran seseorang ternyata tidak selalu menunjukkan keterampilan digital. Studi ini menemukan adanya indikasi bahwa hal itu dipengaruhi oleh pengalaman pendidikan, lingkungan, dan komitmen keguruan.

Berdasarkan pengakuan guru saat diajukan 7 pertanyaan seputar aktivitas yang berkaitan dengan literasi informasi, sebagian besar guru menunjukkan memiliki kebiasaan-kebiasaan positif yang dapat menunjang pengembangan kompetensi pengajar literasi informasi. Pada skala 1 sampai 10, sebagian besar guru mengaku pada posisi antara 8 dan 9. Hanya sedikit guru yang mengaku pada posisi di bawah 5. Adapun 7 pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Seberapa sering Bapak/Ibu mengikuti kegiatan yang menjelaskan cara terhindar dari berita *hoax* baik berupa seminar atau kegiatan lainnya.
2. Seberapa sering Bapak/Ibu melakukan sharing dan diskusi terkait cara mendapatkan informasi yang tepat dengan pustakawan atau guru lain.
3. Seberapa sering Bapak/Ibu berkolaborasi dengan pustakawan dalam proses pembelajaran.
4. Seberapa sering Bapak/Ibu menggunakan alat komunikasi dan alat digital lainnya (hp, komputer, proyektor) dalam membantu menyiapkan materi pembelajaran.
5. Seberapa sering, selain dari buku cetak, Bapak/Ibu mencari referensi untuk pembelajaran dari internet dan sumber informasi elektronik lainnya (e-book, google book, jurnal, surat kabar dll) dalam mendukung proses pembelajaran.
6. Seberapa sering Bapak/Ibu mengidentifikasi kata kunci atau fokus masalah dalam materi pembelajaran sebelum melakukan pencarian dari sumber informasi
7. Seberapa sering Bapak/Ibu mengidentifikasi sumber informasi yang didapatkan dari segi otoritatif dan kebaruan sumber informasi.

Tabel: Deskripsi Statistik

<i>Statistik</i>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mean	6,3	8,0	7,3	8,4	7,7	7,4	8,0
Standard Error	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
Median	7	8	8	9	8	8	9
Mode	8	9	8	9	9	8	9
Range	9	6	6	7	9	9	9
Minimum	1	4	4	3	1	1	1
Maximum	10	10	10	10	10	10	10

4.1.4 Proses Pembelajaran Literasi Informasi di Madrasah

Dari 14 madrasah yang diteliti, disimpulkan bahwa seluruhnya memasukkan konten *online* ke dalam pembelajaran, terlebih pada masa pandemi Covid-19. Namun, tidak ditemukan madrasah yang secara sistematis memasukkan pembelajaran literasi informasi sebagai bagian

dari kurikulum. Tidak ada pemantauan sistematis penggunaan teknologi dan tidak ada diskusi tentang implikasi pedagogisnya untuk pengembangan pembelajaran. Juga tidak ada penilaian yang dibuat untuk belajar tentang pengetahuan yang diperoleh siswa sebagai hasil dari penggunaan teknologi.

Temuan lebih lanjut adalah bahwa sebagian besar guru yang diwawancarai kurang tepat dalam memaknai literasi informasi dan tidak cukup membedakan antara penggunaan alat teknologi dan perubahan substantif yang diperlukan dalam metode pembelajaran. Mereka menggunakan teknologi terutama menemukan bahan ajar dan untuk pemutaran presentasi pembelajaran. Tampaknya mereka kurang menyadari pentingnya menanamkan keterampilan tersebut kepada siswa mereka.

Berdasarkan hasil analisis dokumen *Lesson Plan* atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru, studi ini tidak menemukan adanya madrasah yang menerapkan pembelajaran literasi dengan pendekatan terpadu atau terintegrasi pada semua mata pelajaran. Sebagian besar orang yang diwawancarai berpandangan bahwa pembelajaran literasi informasi berkaitan langsung dengan mata pelajaran TIK, bahkan cenderung menyamakannya. TIK dianggap sebagai pelajaran khusus yang bertujuan untuk memberikan keterampilan teknis mengakses, mengelola, dan menyajikan informasi.

4.2. Pembahasan

Konsepsi guru madrasah terhadap literasi informasi (hasil studi ini) hampir sama dengan yang dihasilkan dari studi lain seperti Boon, Johnston dan Webber (2007), yang cenderung berkisar pada bidang pencarian informasi, keterampilan TIK, dan kegiatan penelitian. Berdasarkan pola antara konsepsi literasi informasi guru dan pendekatan instruksional yang digunakan oleh guru, dapat disimpulkan bahwa konsepsi literasi informasi guru mempengaruhi apa yang mereka fokuskan untuk mengajar dan bagaimana pendekatan

mereka dalam pembelajaran. Pemahaman guru tentang literasi informasi memiliki implikasi yang kuat pada bagaimana mereka mengajar dan mengintegrasikan keterampilan melalui tugas berbasis sumber daya.

Studi ini juga menemukan adanya keterkaitan antara pemahaman atau konsepsi guru tentang literasi informasi dengan pengajaran yang dipraktikkan. Guru mengoperasionalkan pemahamannya melalui beberapa pendekatan pengajaran yang dianggap terbaik untuk mencapai tujuan pengajaran. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan pelatihan literasi informasi yang memadai kepada para guru agar mereka dapat membantu mengembangkan keterampilan literasi informasi peserta didiknya.

Studi ini tidak menemukan adanya madrasah yang menerapkan pembelajaran literasi dengan pendekatan terpadu atau terintegrasi pada semua mata pelajaran. Pendekatan ini oleh Amram et al. (2020) disebut sebagai pendekatan langsung yang banyak diterapkan di banyak negara. Dengan pendekatan seperti itu, pembelajaran literasi informasi hanya menjadi tugas guru TIK. Tidak cukup. Apalagi kenyataannya menunjukkan bahwa sebagian besar praktik pembelajaran TIK di madrasah hanya diarahkan terutama pada pengolahan kata, presentasi PowerPoint, dan pencarian informasi. Tidak banyak memberi ruang untuk belajar bagaimana berpikir kritis untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu informasi yang diperlukan dalam kehidupan. Masih jauh dari usulan Willison & O'Regan (2005) tentang pembelajaran literasi informasi yang lebih holistik dengan memahaminya dalam hal pembelajaran sepanjang hayat. Banyak guru (matapelajaran apapun) tidak menyadari pentingnya pembelajaran literasi informasi atau tidak tahu bagaimana melakukannya.

Apakah setiap mata pelajaran (bidang studi) memungkinkan dijadikan sebagai wahana untuk pembelajaran literasi informasi? Dalam hal ini, Abrizah dan Zainab (2011) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis sumber daya dalam pengajaran sejarah adalah *platform* yang ideal untuk melibatkan siswa dalam literasi informasi melalui merumuskan pertanyaan yang

bermakna, merencanakan tugas, mengumpulkan sumber daya, mengevaluasi informasi, berkolaborasi dengan orang lain, dan melaporkan temuan. Tetapi, tidak berarti hanya pelajaran sejarah yang memungkinkan menjadi wahana. Pembelajaran bidang studi lainnya juga perlu dirancang sebagai wahana untuk pembelajaran literasi informasi. Secara umum, pemilihan model pembelajaran di kelas harus memperhatikan karakteristik matematika itu sendiri dan juga karakteristik peserta didiknya.

Sebagai contoh, matematika memiliki karakteristik yang abstrak. Di Madrasah, guru matematika perlu menghadirkan konteks-konteks nyata agar fakta-fakta, konsep-konsep, operasi-operasi, hubungan-hubungan, dan prinsip-prinsip dalam matematika itu terlihat konkrit. Namun demikian, pembelajaran tetap diarahkan kepada pencapaian kemampuan berpikir abstrak para peserta didik. Artinya, peserta didik juga perlu diajak untuk mengonstruksi atau membangun pengertian-pengertian. Tidak diinformasikan begitu saja. Singkatnya, pembelajaran matematika harus kontekstual dan konstruktif. Bukan tekstual dan informatif. Pembelajaran matematika kontekstual berarti menghadirkan konteks nyata yang berkaitan dengan atau yang menjadi latar belakang munculnya fakta-fakta, konsep-konsep, operasi-operasi, hubungan-hubungan, dan prinsip-prinsip matematik yang dipelajari. Adapun Konteks-konteks yang bisa dihadirkan adalah personal, sosial-budaya, dan sains. Konteks personal berfokus pada aktivitas seseorang dalam lingkungan terkecil, misalnya keluarga atau kelompok yang bersentuhan dengan kegiatan sehari-hari. Konteks sosial-budaya adalah masalah komunitas atau masalah dalam kehidupan di masyarakat, baik pada level lokal, nasional, maupun global. Adapun konteks sains berkaitan dengan aplikasi matematika di alam semesta dan isu serta topik yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Pembelajaran matematika konstruktif berarti memberi ruang kepada peserta didik untuk mengonstruksi pemahaman matematika, melalui bantuan guru sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, dan juga moderator. Dalam pembelajaran matematika yang konstruktif, pengetahuan awal (*pre-knowledge*) yang dimiliki peserta didik, dikembangkan dan diarahkan menuju konsep matematika yang dipelajari. Oleh karena itu, apersepsi menjadi kegiatan penting sebelum pembelajaran matematika dengan pokok bahasan yang baru. Pembelajaran matematika yang kontekstual dan konstruktif akan mendorong peserta didik untuk berpikir, bertanya, memecahkan

masalah, dan mendiskusikan gagasan dan temuannya. Peran guru menjadi semakin penting, kehadiran peserta didik di dalam kelas juga menjadi semakin berarti. Mereka akan menjadi masyarakat pembelajar yang akan terus mengembangkan pengetahuannya lebih lanjut.

Diperlukan pelatihan yang sistematis dan konsisten, dimulai dengan program pelatihan guru bersama instruktur terlatih. Menurut Berliner (1994) terdapat lima tahapan yang dialami guru untuk dapat dikatakan menjadi guru ahli, yaitu: (1) pemula, dengan pengalaman mengajar satu tahun pertama, (2) pemula lanjut, dengan pengalaman mengajar 2-3 tahun, (3) kompeten, dengan pengalaman mengajar 3-4 tahun, (4) cakap/pandai, dengan pengalaman mengajar 5 tahun, dan (5) ahli, dengan pengalaman mengajar 5 tahun ke atas. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semakin lama seorang guru menekuni tugas mengajar, semakin tinggi penguasaan dalam melakukan tugas mengajar. Jika mengacu pada teori tersebut, maka seharusnya sebagian besar guru menunjukkan keahliannya, karena masa kerjanya lebih dari 5 tahun. Kesimpulan sementara yang bisa ditarik adalah bahwa masa kerja tidak selalu berbanding lurus dengan pengalaman belajar. Tidak semua guru menunjukkan komitmen belajar yang baik.

Pendidikan keguruan merupakan proses yang berkesinambungan dengan komponen *pre-service* dan *in-service* yang saling melengkapi. Artinya, pengembangan kemampuan guru tidak dapat sepenuhnya disiapkan dalam suatu program khusus dengan masa tempuh yang ditentukan, melainkan harus terus dikembangkan sepanjang hayat. Di Indonesia, rangkaian program pendidikan keguruan meliputi pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik keguruan diselenggarakan oleh LPTK, sementara pendidikan profesi keguruan diselenggarakan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Artinya, untuk bisa diangkat sebagai seorang guru, maka harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi profesi keguruan. Selain itu, upaya-upaya untuk mengembangkan kemampuan mengajar guru juga terus dilakukan melalui program-program pelatihan. Adapun dalam kajian ini, program pendidikan keguruan yang dimaksudkan adalah program pendidikan keguruan jenjang Strata-1 (S1) yang diselenggarakan di perguruan tinggi sebagai LPTK, atau lebih dikenal dengan

istilah “program pendidikan keguruan berbasis perguruan tinggi”, sebagai gerbang awal penyiapan calon guru.

Secara umum, tujuan program pendidikan keguruan adalah untuk menyiapkan guru yang baik untuk sekolah dasar dan menengah. Dalam konteks guru sebagai pendidik atau pengajar, istilah “guru yang baik” (*good teacher*) berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru untuk dapat melakukan pengajaran yang efektif di kelas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan keguruan secara umum bertujuan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi keguruan. Istilah ‘kompetensi’, sebagaimana dinyatakan oleh Spencer & Spencer (1993), merupakan karakteristik individu yang dapat memprediksi perilaku dan kinerja yang efektif atau superior dalam situasi kerja. Dengan demikian, istilah ‘kompetensi keguruan’ dapat dimaknai sebagai karakteristik individu yang dapat memprediksi perilaku dan kinerja yang efektif atau superior dalam situasi kerja guru.

Kompetensi guru yang berkualitas atau guru yang baik itu sendiri merupakan isu yang sangat kompleks. Beberapa peneliti telah memusatkan perhatian pada aspek yang berbeda tentang kompetensi guru yang baik. Di Indonesia, sebagaimana dimamanatkan dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, karakteristik guru yang berkualitas ditandai oleh empat kompetensi yaitu (1) pedagogik, (2) kepribadian, (3) sosial, dan (4) profesional. Sementara Casey & Childs (2007) menguraikan karakteristik guru yang baik dalam empat kompetensi yaitu (1) pengetahuan konten, (2) pengetahuan pedagogik, (3) keterampilan pedagogik, dan (4) sikap. Sedangkan Chong & Cheah (2009), menguraikan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan program pendidikan keguruan menjadi tiga yaitu (1) pengetahuan, (2) keterampilan, dan (3) nilai. Namun demikian, meskipun terdapat perbedaan perhatian tentang aspek kompetensi keguruan, secara garis besar dapat ditemukan titik kemiripannya dan dikelompokkan dalam tiga domain kompetensi saja, dengan mengacu pada *Taksonomi Bloom*.

Taksonomi Bloom (Bloom, 1976; Bloom, Hastings dan Madaus, 1971; Bloom, Mesia dan Krathwohl, 1964) mendasarkan pada tiga domain kegiatan pendidikan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif berhubungan dengan kemampuan mental (pengetahuan), domain afektif untuk pertumbuhan perasaan atau daerah emosional (sikap), sedangkan domain psikomotorik berkaitan dengan keterampilan manual atau fisik (keterampilan). Taksonomi ini berkaitan dengan hasil belajar, karena mendefinisikan apa yang harus diperoleh individu setelah proses pelatihan (program), dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Misi program pendidikan keguruan adalah mengembangkan keseluruhan kompetensi yang terkait dengan keguruan, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut Spencer & Spencer (1993), level kompetensi seseorang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah bagian permukaan (*surface*) yang terlihat dan mudah dikembangkan, dan bagian kedua adalah bagian sentral atau inti-kepribadian (*core-personality*) yang tidak terlihat dan sulit dikembangkan. Pengetahuan dan keterampilan adalah termasuk dalam kompetensi yang terlihat dan dapat dikembangkan. Sementara komitmen, sifat-sifat, motif, sikap, dan nilai-nilai, adalah termasuk kompetensi yang tidak terlihat dan sulit dikembangkan.

Dalam konteks seleksi masuk program pendidikan keguruan, juga seleksi atau perekrutan calon guru, inti-kepribadian harus menjadi perhatian utama. Dengan kata lain, tuntutan tersebut harus terpenuhi atau terjawab pada saat seleksi masuk program pendidikan keguruan, dan juga oleh pimpinan lembaga/madrasah yang menyeleksi calon guru.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil evaluasi menyimpulkan dan merekomendasikan sebagai berikut:

1. Madrasah perlu merumuskan kebijakan pembelajaran yang adaptif sesuai dengan jaman yang akan dihadapi oleh peserta didik; Rumusan kebijakan tersebut harus diterjemahkan oleh setiap guru dalam pembelajaran di kelas, apapun bidang studinya.
2. Peningkatan kualitas guru harus menjadi program berkelanjutan, tidak pernah berhenti, untuk semua guru. Guru harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang menjadi *subject matter*, metodologi pembelajaran, dan juga teknologi pembelajaran.
3. Diperlukan peninjauan kurikulum madrasah secara berkala yang mengarah pada perubahan tuntutan masyarakat global dengan mempertahankan kearifan lokal.
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan peserta didik dapat berkembang optimal tidak dapat diabaikan dalam mendukung kegiatan madrasah yang lebih kompetitif, seperti dukungan laboratorium, multi media, dan sarana praktikum.
5. Seleksi masuk program pendidikan keguruan, juga seleksi atau perekrutan calon guru, perlu mempertimbangkan inti-kepribadian (termasuk di dalamnya adalah komitmen keguruan).

Referensi

- ACRL. 2000). *Information literacy competency standards for higher education*.
- American Association of School Librarians (AASL) and Association for Educational Communications and Technology (AECT). (1998). *Information Power: Building Partnerships for Learning*. Chicago, American Library Association.
- American Library Association. (1989). *Presidential Committee on Information Literacy*. Final Report. Chicago: American Library Association.
- American Library Association. (2000). Information literacy competency standards for higher education.
- As'ad, Mahrus. (2014). Pembaruan Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama. *Nizham*, 3 (2), 71.
- Bashori. (2017). Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra. *Nadwa*, 11 (2), 288.
- Bawi, Z. A. (2002). Implementing technology in schools: perception of principals towards the implementation of Malaysian Smart School. Unpublished Master thesis. International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Breivik, P. S., & Senn, J. A. (1994). *Information Literacy: Educating Children for the 21st Century*. Scholastic Inc., 411 Lafayette, New York, NY 10003.
- Deliasari, A., & Kurnianingsih, I. (2017). Analisis Kebutuhan Topik Pembelajaran Literasi Informasi Online Pada Perpustakaan Sekolah MAN Insan Cendekia. *EduLib*, 7(2).
- Eriyanto. (2019). Pengelolaan Madrasah yang Efektif: Menjawab Tantangan Pendidikan Islam Era 4.0, 4 (1), 74.
- Garner, S. D. 2006. *High-Level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypt, November 6-9, 2005: Report of a meeting sponsored by the United Nations Education, Scientific, and Cultural Organisation (UNESCO), National Forum on Information Literacy (NFIL) and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)*.
- Hart, G. (2000). Project work as a vehicle for information literacy education in a circuit of South African primary schools. Proceedings of the 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel 13-18 August 2000. Available at: <http://ifla.queenslibrary.org/IV/ifla66/papers/074-133e.htm>.
- Hawi, Akmal. (2017). Otonomi Pendidikan dan Eksistensi Madrasah. *Conciencia*, 17 (1), 2.
- Huda, Khoirul. (2016). Problematika Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. *Dinamika Penelitian*, 16 (2), 319.
- Jamaluddin, N. (2018). *Implementasi Program Gerakan Literasi Madrasah: Penelitian Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung, Jawa Barat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

- Juliane, C., Arman, A. A., Sastramihardja, H. S., & Supriana, I. (2017). Digital Teaching Learning for Digital Native; Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 29-35.
- Julien, H. and S. Barker. (2009). How high-school students find and evaluate scientific information: A basis for information literacy skills development. *Library & Information Science Research*, Vol. 31: 12-17.
- Kosim, Mohammad. (2007). Madrasah di Indonesi (Pertumbuhan dan Perkembangan). *Tadris*, 2 (1), 57.
- Kurnianingsih, I., Rosini, R., & Erza, E. K. (2018). Library Class: Model Pembelajaran Literasi Informasi Tingkat Sekolah Dasar (Studi Kasus SD Madania). *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, 27(2), 51-58.
- Kurniawan, S. (2019). Tantangan Abad 21 bagi Madrasah di Indonesia. *Intizar*, 25(1), 55-68.
- Lau, J. (2006). Guidelines on information literacy for lifelong learning.
- Lloyd, A. (2005). Information literacy: different contexts, different concepts, different truths? *Journal of Librarianship and information Science*, 37(2), 82-88.
- Mahdalena. (2017). Sejarah Pendidikan Islam Madrasah (Sekolah Umum yang Berciri Khas Islam). *An-Nizom*, 2 (1), 120.
- Moore, P. (2002). *An analysis of information literacy education worldwide*. White Paper prepared for UNESCO, the U.S. National Commission on Libraries and Information Science, and the National Forum on Information Literacy. Information Literacy Meeting of Experts, Praque, The Czech Republic.
- Pattah, S. H. (2014). Literasi informasi: peningkatan kompetensi informasi dalam proses pembelajaran. *Khazanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 2(2), 108-119.
- Prensky, M., (2001). Digital natives, digital immigrant. *On the Horizon*, 9 (5)
- Purwanti, K. Y., Putra, L. V., & Hawa, A. M. (2018). Literasi informasi untuk meningkatkan keterampilan pencarian informasi ilmiah siswa SMA. *International Journal of Community Service Learning*, 2(4), 237-241.
- Rosidin, DN. (2007). From Kampung to Kota: A Study of the Transformation of Mathlaul Anwar.
- Sahputra, D. (2018). Dinamika Madrasah sebelum Indonesia Merdeka. *ITTIHAD*, 2 (2), 155-158.
- Sardar, Z. (1988). Tantangan Dunia Islam Abad 21, Mizan, Bandung
- Septiantono, T. (2017). Konsep Dasar Literasi Informasi. *Jakarta: Universitas Terbuka*. [Online] Diakses dari: [http://repository. ut. ac. id/4198/1/PUST4314-M1.pdf](http://repository.ut.ac.id/4198/1/PUST4314-M1.pdf) pada, 25-10.

- Sriwijaya, S. T. A. B. N. *Etika Komputer dan Kompetensi Content Evaluation sebagai Strategi Menangkal Radikalisme Guna Meningkatkan Nasionalisme di Era Digital*.
- Trihoran, Emmeria. (2019). Guru Dalam pengajaran abad 21. *Sapa*, 4 (1), 54.
- Wallace, M. C., Shorten, A., & Crookes, P. A. (2000). Teaching information literacy skills: an evaluation. *Nurse education today*, 20(6), 485-489.
- Weiner, J. 2011. Is there a difference between critical thinking and information literacy? A systematic review 2000-2009. *Journal of Information Literacy* 5(2): 81-92.
- Weiner, S. 2011. How information literacy becomes policy: An analysis using the Multiple Streams Framework. *Library Trends* 60(2): 297-311.
- Williams, D. & Wavell, C. (2006). *Information literacy in the classroom: Secondary school teacher's conceptions*. Final report on research funded by Society for Educational Studies. Research Report 15. The Robert Gordon University.
- Yusup, P. M., & Saepudin, E. (2017). Praktik literasi informasi dalam proses pembelajaran sepanjang hayat (information literacy practices in the process of lifelong learning). *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 5(1), 79-94.

**KUISISIONER PENELITIAN EVALUASI LITERASI INFORMASI
DI MADRASAH ALIYAH**

I. Identitas Enumerator			
Nama			
Status	Peneliti/Asisten Peneliti		
II. Identitas Madrasah dan Informan			
Nama Madrasah			
Alamat Madrasah			
Tanggal Wawancara			
Nama Informan	Umur	Jabatan	Alamat
III. Kuisisioner			
A. Konteks Pembelajaran Literasi Informasi (ditujukan ke Kepala Madrasah)			
<p>1. Sebagaimana telah banyak diketahui bahwa tantangan bagi madrasah di abad 21 adalah menghadapi siswa yang terlahir sebagai <i>digital natives</i> atau orang dengan serba digital di sekitar kehidupan mereka di era informasi (revolusi Industri 4.0). Hal ini tentunya menuntut kesiapan pihak madrasah menyiapkan segalanya mulai dari kebijakan yang tepat dan responsif, SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memadai, ketersediaan sarana prasarana yang mendukung dan proses pembelajaran yang berbasis pada penguasaan dan pemanfaatan informasi. Bagaimana bapak/ibu sebagai kepala melihat kesiapan madrasah bapak ibu menghadapi tantangan tersebut?</p> <p>2. Apa sajakah modal yang telah ada pada madrasah yang bapak/ibu pimpin untuk menghadapi tantangan tersebut?</p> <p>3. Apa saja kelemahan dan kesulitan yang ada pada madrasah yang bapak/ibu pimpin untuk menghadapi tantangan tersebut?</p> <p>4. Bagaimana kiat dan strategi yang diterapkan oleh bapak/ibu agar madrasah mampu menghadapi tantangan tersebut?</p>			

5. Apakah kiat dan strategi bapak ibu tersebut sudah termuat dalam visi, misi, started dan tujuan madrasah?
6. (Jika belum) mengapa?
7. (Jika sudah) Bagaimana strategi bapak/ibu mengimplementasikanya?
8. Adakah program khusus yang bapak ibu canangkan untuk mengimplementasikan visi, misi, strategi dan tujuan tersebut?
9. Apakah program tersebut diberlakukan kepada semua guru atau guru tertentu?
10. Sudah berapa lama program tersebut dilaksanakan?
11. Adakah sistem monitoring dan evaluasi yang bapak ibu buat untuk pelaksanaan program tersebut?
12. Jika dari hasil evaluasi memerlukan kebijakan khusus bapak/ibu, bagaimana bapak/ibu meresponnya?
13. Adakah sistem rewards and punishment terkait dengan pelaksanaan program tersebut?

B. Input Pembelajaran Literasi Informasi (ditujukan kepada Guru Madrasah)

1) Kesiapan guru dalam pembelajaran literasi informasi

Pernyataan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Seberapa sering Bapak/Ibu mengikuti kegiatan yang menjelaskan cara terhindar dari berita hoax baik berupa seminar atau kegiatan lainnya.										
2. Seberapa sering Bapak/Ibu melakukan sharing dan diskusi terkait cara mendapatkan informasi yang tepat dengan pustakawan atau guru lain.										
3. Seberapa sering Bapak/Ibu										

berkolaborasi dengan pustakawan dalam proses pembelajaran.										
4. Seberapa sering Bapak/Ibu menggunakan alat komunikasi dan alat digital lainnya (hp, komputer, proyektor) dalam membantu menyiapkan materi pembelajaran.										
5. Seberapa sering Selain dari buku cetak, Bapak/Ibu mencari referensi untuk pembelajaran dari internet dan sumber informasi elektronik lainnya (e-book, google book, jurnal, surat kabar dll) dalam mendukung proses pembelajaran.										
6. Seberapa sering Bapak/Ibu mengidentifikasi kata kunci atau fokus masalah dalam materi pembelajaran sebelum										

melakukan pencarian dari sumber informasi										
7. Seberapa sering Bapak/Ibu mengidentifikasi sumber informasi yang didapatkan dari segi otoritatif dan kebaruan sumber informasi.										

2) Sarana dan Prasarana pendukung pembelajaran literasi informasi

1. Apakah sudah ada perpustakaan digital di sekolah/madrasah?
2. (Jika belum) mengapa?
3. (Jika sudah) bagaimana sistem perpustakaan digital yang digunakan?
4. Adakah tempat pojok baca didalam kelas?
5. Sejauh mana sekolah/madrasah dalam menyiapkan buku ajar dengan ketentuan 70% non-fiksi dan 30% fiksi sejumlah siswa/peserta didik?
6. Adakah web sekolah/madrasah?
7. (Jika belum) mengapa?
8. (Jika sudah) seperti apa web sekolah/madrasah?
9. Adakah akses internet/WiFi untuk sekolah/madrasah?
10. (Jika belum) mengapa?
11. (Jika sudah) sejauh mana efektif akses internet/WiFi dalam menunjang literasi informasi pada sekolah/madrasah?
12. Adakah spanduk, poster, leaflet, dan/atau brosur dalam menunjang literasi informasi sekolah/madrasah?

C. Proses Pembelajaran Literasi Informasi (ditujukan kepada Guru Madrasah)

1. Referensi apa saja yang biasa Bapak/Ibu gunakan dalam mempersiapkan materi?
2. Apa kesulitan yang dialami oleh siswa saat pembelajaran berlangsung dan apa faktornya?

3. Apa reaksi siswa ketika tidak dapat memahami materi yang disampaikan?
4. Bagaimana Bapak/Ibu mengarahkan siswa yang tidak memahami materi yang disampaikan?
5. Model dan Metode apa yang lebih banyak Bapak/Ibu gunakan dalam proses pembelajaran?

Poin	Pernyataan	Ya	Tidak
a.	Bapak/Ibu memberikan apersepsi ketika memulai pembelajaran		
b.	Bapak/Ibu menyampaikan sendiri materi dari awal hingga akhir pembelajaran		
c.	Bapak/Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapat di sela-sela penjelasan materi		
d.	Bapak/Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi terhadap materi/proses pembelajaran		

6. Ketika menggunakan metode tersebut, apakah siswa aktif berpendapat dan melakukan tanya jawab?
7. Apakah Bapak/Ibu memberikan kebebasan kepada siswa untuk mendapatkan pemahaman materi dari berbagai referensi?
8. Apakah Bapak/Ibu memberikan penjelasan atau arahan terkait referensi apa saja yang dapat digunakan oleh siswa?
9. Apakah siswa ditugaskan untuk membuat ringkasan atau mereview materi yang diajarkan?
10. Apakah Bapak/Ibu menganjurkan siswa untuk melakukan parafrase dalam membuat ringkasan atau mereview?
11. Apakah Bapak/Ibu mendorong siswa untuk dapat memberikan contoh/ilustrasi dari materi yang dipelajari dan mengaitkannya dengan permasalahan secara umum dalam kehidupan sehari-hari?
12. Apakah Bapak/Ibu menekankan kepada siswa untuk menyebutkan atau menuliskan referensi dari pendapat yang mereka sampaikan?

D. Kemampuan Literasi Informasi (ditujukan kepada Siswa Madrasah)

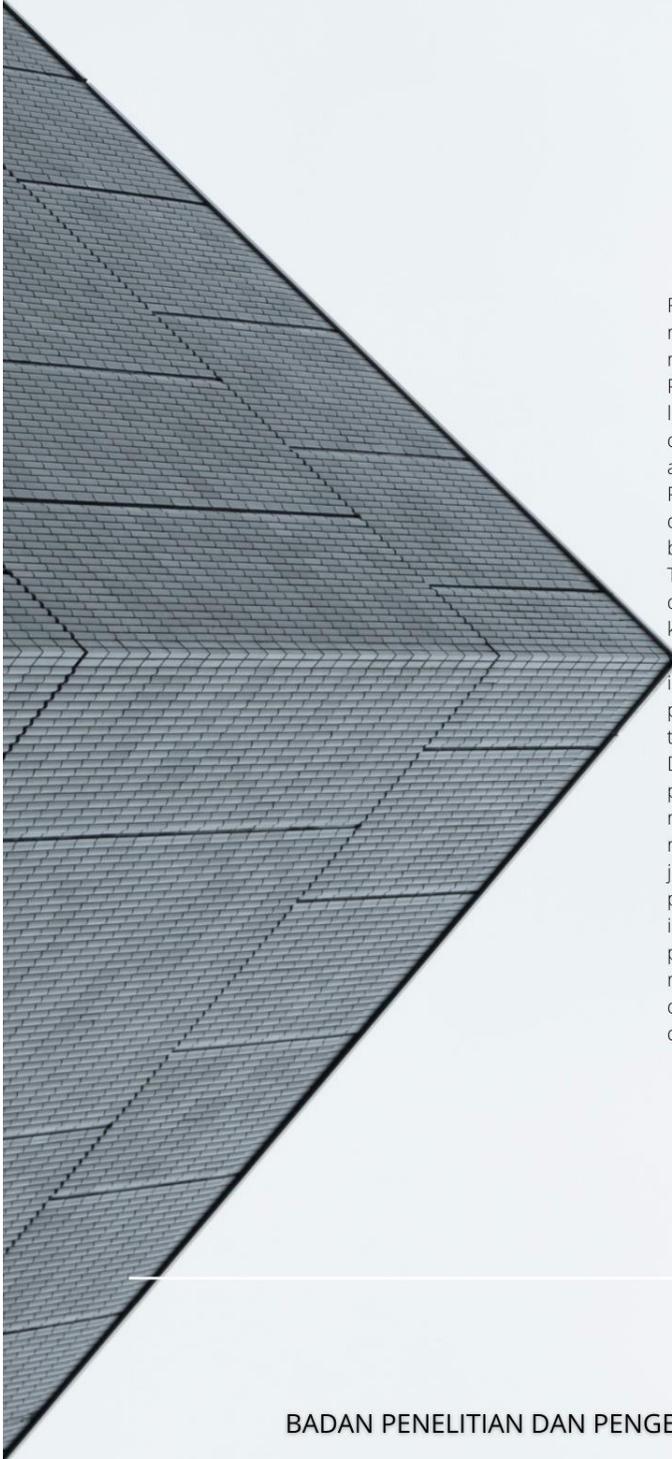
1. Dikelas sedang terjadi proses pembelajaran mengenai materi terkini, lantas anda diminta untuk mengakses internet agar menemukan informasi terupdate, namun sarana (WiFi) di madrasah anda kurang memiliki jaringan stabil, apakah yang akan anda lakukan?
 - a. Diam saja menunggu jaringan (WiFi) bisa dipakai
 - b. Menggunakan jaringan internet pribadi agar bisa mengakses informasi terbaru tersebut

2. Pada proses pembelajaran guru sedang menerangkan materi dengan baik dan jelas, namun diantara siswa ada yang masih belum paham, padahal sudah dijelaskan berulang oleh guru tersebut, apa yang akan anda lakukan?
 - a. Memberikan penjelasan kepada teman yang masih belum mengerti
 - b. Menjelaskan walaupun terpaksa

3. Bayangkan Anda sedang di dalam kelas suatu mata pelajaran. Guru pada akhir pembelajaran meminta kelas Anda membuat ringkasan materi yang sudah diajarkan. Akan tetapi, ada teman Anda mengalami kesulitan membuat ringkasan materi karena tidak memperhatikan dan lupa membawa buku mata pelajaran tersebut. Sementara guru hanya memberikan waktu 15 menit untuk membuat ringkasan. Apa yang akan anda lakukan?
 - a. Memberikan ringkasan materi yang telah Anda buat untuk langsung disalin oleh teman Anda karena waktu yang singkat
 - b. Hanya menjelaskan poin-poin materi lalu menyarankan agar teman Anda mencari tambahan ringkasan dari internet

4. Anda adalah salah satu penggemar Lesti Kejora. Ketika Anda membuka Youtube, ada beranda channel Youtube yang berjudul “Lesti Kejora Hamil Diluar Nikah”. Anda memutar channel tersebut namun anda langsung melihat kolom komentar dan komentar negatif lebih dominan di dalamnya. Bagaimana reaksi Anda?
 - a. Anda memutar video sampai selesai dan mencari channel Youtube lain dengan berita yang sama
 - b. Anda menganggap bahwa itu adalah berita hoax dan tidak menshare-nya

5. Di sekolah, Anda dikenal sebagai seorang kutu buku, juga dikenal sebagai siswa yang cerdas dan pandai dalam berargumen. Anda baru saja mengikuti kegiatan yang di dalamnya menjelaskan bahwa ketika Anda berpendapat menggunakan ide atau mengutip perkataan seseorang maka anda harus menyebutkan sumbernya. Dalam suatu kesempatan Anda berargumen dan berniat menyebutkan sumber ide dari argumen Anda. Namun di akhir Anda berargumen Anda lupa menyebutkan sumber ide tersebut. Apa yang harus Anda lakukan?
- Membiarkan saja karena lupa dan karena terlanjur sudah dalam posisi duduk kembali.
 - Anda kembali izin berargumen hanya untuk menjelaskan sumber referensi dari argumen yang telah Anda sampaikan.
6. Anda adalah siswa disekolah A. Teman Anda siswa di sekolah B. Anda mendapat cerita dari teman Anda bahwa dirinya semakin aktif berpendapat dalam pembelajaran karena guru disekolah teman Anda mengizinkan untuk mengakses berbagai materi pelajaran dari banyak sumber termasuk internet. Teman Anda pun memberi tahu bagaimana cara mengakses dan memberi tahu situs-situs yang tepat untuk diakses sebagaimana yang telah diajarkan gurunya. Bagaimana sikap Anda?
- Antusias bertanya dan belajar dari teman Anda untuk di terapkan saat pembelajaran nanti
 - Hanya mendengarkan cerita teman Anda, karena anda berpikir toh sekolahnya pun berbeda
7. Hari ini Anda ada jadwal presentasi di kelas. Guru memberi tugas menyampaikan presentasi dengan *mind map*. Namun, *mind map* yang telah Anda buat ketinggalan di rumah. Sementara pembelajaran akan segera dimulai dalam waktu 20 menit. Dan estimasi perjalanan untuk pulang pergi sekolah-rumah juga diperkirakan memakan waktu 20 menit. Apa yang akan anda lakukan?
- Mengambil *mind map* yang tertinggal dirumah karena sudah dipersiapkan
 - Membuat *mind map* baru dengan mengakses dari sumber informasi yang ada



Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menganalisis, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif, mengharuskan untuk meninjau kembali dunia pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran literasi informasi di madrasah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian evaluatif. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Penelitian dilakukan di 14 Madrasah Aliyah yang ada di Jawa Barat. Hasil identifikasi menemukan bahwa sebagian besar guru memiliki konsepsi literasi informasi sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang secara terbatas dipahami sebagai keterampilan komputer pengolah kata dan keterampilan mencari informasi Internet. Hanya sedikit guru yang memiliki konsepsi literasi informasi sebagai penerapan informasi untuk menghasilkan pengetahuan baru berkisar pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang materi pelajaran melalui penggunaan informasi. Demikian juga konsepsi literasi informasi sebagai pengalaman penelitian, seperti mengumpulkan pengalaman data primer, mengembangkan keterampilan menulis penelitian, dan menawarkan siswa untuk belajar melalui pengalaman. Studi ini juga menemukan adanya kesenjangan antara konsepsi dan praktik penerapannya. Banyak guru melihat perangkat teknologi informasi sebagai alat yang efektif untuk mengelola pembelajaran literasi informasi, tetapi tidak selalu berarti menggunakannya. Beberapa penyebabnya adalah terkait dengan dukungan perangkat, akses, pengetahuan, keterampilan, dan komitmen.



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA RI**